



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUSPELIATI
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 420826

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 768.000.000

1. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA BARITO SELATAN, WARISAN Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 25000 m2 di KAB / KOTA BARITO SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 2223 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 167.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000



2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO NC1100 VARIO JF 12 E Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 97.500.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 234.550.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.267.050.000

III. HUTANG Rp. 145.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.122.050.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.